

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (STUDI KASUS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI X)

Laila Fitriani¹, Sella Destia²

¹Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia

²Magister Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: lailashijab@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) X apakah sudah sesuai dengan kriteria pengendalian internal pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 serta mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu diperbaiki dalam implementasi SPI di PTN X. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang meliputi observasi partisipan, wawancara dan kuesioner, kelompok diskusi terarah, serta analisis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum implementasi SPI di PTN X telah efektif, namun terdapat beberapa area spesifik yang perlu diperbaiki yaitu kebutuhan untuk peninjauan SOP yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dan efektivitas dalam penerapan integritas dan etika kerja di PTN X, tindak lanjut evaluasi kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal, serta proses pencatatan persediaan barang yang belum sesuai dengan fisiknya. Implikasi teori dari penelitian ini perguruan tinggi dapat memperbaiki aspek-aspek yang belum memadai, sehingga SPI dapat beroperasi lebih efisien dan berhasil dalam mengejar tujuan instansi. Temuan ini juga bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan perguruan tinggi secara umum. Kebaruan penelitian ini menilai penerapan SPI berdasarkan konteks Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) melalui kasus perguruan tinggi negeri. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap elemen SPI agar implementasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaannya.

KATA KUNCI

Pengendalian Internal Pemerintah, Evaluasi, Perguruan Tinggi Negeri, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan tempat yang mendorong kemajuan di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya melalui ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, persaingan untuk menjadi lembaga pendidikan terdepan semakin intensif. Perguruan tinggi kini tidak hanya diukur berdasarkan jumlah mahasiswa, tapi diukur juga dari kualitas kinerja yang mereka tawarkan. Akibatnya, perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri, berlomba-lomba untuk menanggulangi kekurangan mereka dan menggunakan peluang dengan keunggulan yang dimiliki. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013) definisi dari kinerja adalah jumlah dan mutu hasil kerja yang dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Salah satu metode untuk menggambarkan kinerja yang berkualitas yaitu kinerja suatu instansi mencapai tujuan sesuai harapan dan sasaran maupun menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu dengan perolehan yang optimal. Pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO dapat membantu manajemen puncak mencapai hasil yang berkualitas tinggi. Semua organisasi, baik publik, komersial, maupun profesional, sangat bergantung pada sistem pengendalian internal mereka untuk memastikan bahwa organisasi mereka berjalan secara efisien dan memenuhi tujuan mereka (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Kerangka kerja COSO tentang pengendalian internal menjelaskan metode yang digunakan oleh direktur, manajer, dan karyawan untuk memastikan bahwa operasional organisasi berjalan dengan efisien dan efektif, bahwa informasi keuangan dapat diungkapkan dan andal, dan bahwa semua hukum yang berlaku dipatuhi (COSO, 2013). Dalam konteks COSO menggambarkan pengendalian internal terdiri dari lima bagian, yakni kontrol lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Apabila semua komponen ini disiapkan dengan baik, manajemen puncak dapat mengendalikan organisasi secara efektif. Pengendalian yang efektif memungkinkan organisasi mencapai target operasi mereka dengan sukses dan juga meminimalkan risiko yang dihadapi (Rapina & Christyanto, 2011).

Dalam penelitian Adella Fitri et al. (2022) menyatakan bahwa kinerja yang optimal dapat terlaksana dari SPI yang didukung oleh berbagai bentuk dukungan, termasuk dukungan material dan moral. Dalam konteks ini, dukungan moral merujuk pada hubungan antara manajemen pimpinan dan pihak lainnya untuk memastikan bahwa SPI dapat berperan secara memadai, lalu keberadaan kepastian hukum dan regulasi yang gamblang sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas SPI sebagaimana disebutkan dalam STATUTA dan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Amri, N., & Fajarina Laming, R. (2022) mengklasifikasikan metode SPI sudah dibuat dan pihak organisasi beranggapan telah melaksanakannya. Namun, banyak masalah yang dihadapi oleh unit akuntansi tidak sesuai dengan SPI yang telah dibuat dan diharapkan oleh pihak organisasi, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu adanya kendala yang ditemui oleh unit akuntansi tersebut, peneliti berharap masalah ini akan memberikan inspirasi kepada organisasi lain untuk lebih fokus lagi pada penerapan SPI yang efektif dan efisien pada setiap unit organisasinya.

Pada dasarnya penerapan SPI organisasi yang berjalan dengan baik, akan memenuhi berbagai unsur yang membangun pengendalian intern yang kokoh dan konsep investigasi akuntansi sudah diterapkan secara efektif dalam organisasi, seperti yang tercantum dalam riset Alamsyahbana et al., (2022). SPI yang direncanakan serta dilaksanakan dengan baik dapat mencegah kecurangan. Kemudian manajemen instansi yang optimal yang dikombinasikan dengan nilai-nilai yang kuat akan mewujudkan lembaga yang sehat serta mencegah kecurangan (Ulum, S. N., & Suryatimur, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Humam, H., Ardini, L., & Kurnia (2020) penerapan SPI sudah berjalan efektif namun masih belum optimal dengan adanya rangkap jabatan, dan setiap kegiatan perlu dilakukan identifikasi resiko yang jelas sampai level aktivitas pada masing-masing sub bagian. Hal ini penting untuk memantau pencapaian sasaran mutu di Bagian SPI secara berkala dan teratur. Studi yang dilakukan oleh Abdulah, V., Tinangon, J., & Maradesa (2023) menunjukkan bahwa SPI pada pengeluaran kas telah diterapkan dengan baik, namun para pimpinan bagian harus memberikan respon dengan segera untuk menangani data atau bukti yang kurang lengkap agar segala kendala dapat segera diatasi.

Hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti hendak mengeksplorasi bagaimana pengendalian intern diterapkan pada PTN X. Karena berdampak pada setiap bagian organisasi, pengendalian internal adalah teknik yang baik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah atau anomali manajemen. Dalam kasus ini, PTN X menjadi fokus penelitian kami karena posisinya yang strategis. PTN X juga dapat berfungsi sebagai prototipe kesulitan manajemen perguruan tinggi dan penilaian implementasi SPI yang telah diterapkan selama ini.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (2008), studi ini bertujuan untuk menilai penggunaan SPI Satuan Kerja (Satker) PTN X. Dalam masa mendatang, hasil studi ini mungkin dapat mendorong organisasi untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal. Dengan melakukan evaluasi SPI, organisasi juga dapat memastikan bahwa operasional kegiatannya dapat bekerja dengan baik dan optimal yang dapat mendukung dalam pencapaian sasaran organisasi. Semua aturan dan perundang-undangan yang ditetapkan wajib dipatuhi oleh instansi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa ia telah menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan adalah proses untuk memilih, mengevaluasi, dan memperbaiki kegiatan yang telah dan yang belum dilakukan (Refkah, G. E., & Shaleh, 2023). Salah satu komponen manajemen adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan dengan baik dan menggapai sasaran yang diharapkan (Wangi, G. S., & Sarumpaet, 2024). Menurut Maulana Sandria et al. (2022) SPI adalah seperangkat metode dan pedoman untuk mengukur pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk menjaga agar data akuntansi dapat diandalkan sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang efisien dan menaati semua undang-undang dan peraturan yang terkait.

Pengendalian internal digunakan oleh suatu organisasi untuk menunjang perolehan sasaran kinerja organisasi dan mengembangkan mutu kepada pihak terkait. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, tujuan implementasi SPIP yaitu memberi keyakinan atas efisiensi dan efektivitas operasional instansi, pelaporan keuangan yang konsisten dan andal. Pengendalian internal juga bertujuan untuk mengembangkan tata kelola organisasi yang baik melalui perlindungan aset negara serta kepatuhan hukum atas aturan dan perundang-undangan. Dalam konteks ini SPIP secara efektif mengelola dan mengendalikan risiko untuk memastikan integritas dan keamanan operasional secara menyeluruh. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan berfungsi untuk melindungi aset organisasi dalam seluruh kapasitas operasionalnya.

SPIP merupakan metode yang memungkinkan organisasi mengendalikan segala probabilitas yang dapat memperlambat perolehan sasarannya dengan kegiatan yang efisien dan efektif serta pelaporan keuangan yang konsisten. Suatu organisasi pemerintah akan menggapai sasaran-sasaran yang berkaitan dengan kepatuhan hukum terhadap aturan dan perlindungan aset negara dengan menggunakan SPIP. Seperti

yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara (2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP, mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah menyelenggarakan SPIP untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi.

Tujuan dari penerapan SPI dalam organisasi yaitu membantu pencapaian efisiensi dan produktivitas operasional (Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, 2020). SPI yang kuat dapat menyokong perolehan sasaran kinerja yang diharapkan, menumbuhkembangkan keandalan pihak terkait, meningkatkan ketaatan atas hukum, dan mengurangi kendala yang merugikan. Dalam bukunya Tuanakotta, T.M. (2019) menyatakan, lima unsur utama pengendalian internal berdasarkan COSO adalah kontrol lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dimana saling berhubungan dan disinkronkan untuk mendukung organisasi dalam menggapai sasaran mereka melalui pengendalian internal yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP, ada lima bagian yang membentuk sistem ini adalah: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan. Dalam hal pentingnya pengendalian internal, Lingkungan Pengendalian adalah landasan bagi manajemen dan karyawan untuk membangun konsep dan tindakan mereka. Melakukan penilaian risiko dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman terhadap tujuannya. Agar arahan manajemen dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan aktivitas pengendalian. Hal ini termasuk kebijakan dan prosedur. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait kepada individu yang membutuhkannya bergantung pada informasi dan komunikasi yang efektif. Memeriksa efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu adalah inti dari pemantauan.

Dalam artikel Syawalina, C. F. et al., (2022) menguraikan enam prinsip dasar yang harus dipenuhi pada sistem pengendalian internal yaitu: Pembagian Wewenang, Prosedur Otorisasi, Prosedur Dokumentasi, Prosedur Catatan Akuntansi, Pengendalian Fisik, serta Audit Internal Bebas. Konsep Pembagian Wewenang menjamin bahwa tidak ada kewajiban yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Prosedur Otorisasi mengatur proses pemberian dan pemisahan otorisasi agar meyakinkan bahwa hanya pegawai yang memiliki wewenang yang dapat melakukan tugas tertentu. Tujuan Prosedur Dokumentasi adalah untuk menjamin pencatatan yang benar dan lengkap dari semua transaksi dan kejadian. Prosedur dan Catatan Akuntansi menetapkan struktur sistematis untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi keuangan secara berkala sesuai dengan standar yang relevan. Pengawasan fisik diterapkan untuk melindungi aset fisik organisasi dari potensi kehilangan atau penggunaan yang tidak sah. Audit Internal Bebas dilakukan untuk mengevaluasi secara independen efektivitas SPI serta memastikan ketaatan atas aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif yaitu macam penelitian yang menciptakan konsep berdasarkan pada data yang ada, dan menekankan pada fleksibilitas dan validitas penelitian yang dihubungkan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan data (Arikunto, 2006). Karena data yang diperoleh dan penelaahannya lebih bersifat kualitatif, maka penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mencakup wawancara kepada informan, observasi partisipan, dan kelompok diskusi terarah. Selain itu, kami menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis prosedur dan kriteria yang berkaitan dengan penerapan SPI PTN. PP No. 60 Tahun 2008 secara khusus membahas komponen-komponen SPIP, dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 yang berfokus pada evaluasi kematangan pengelolaan SPIP terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (2021) merupakan sumber-sumber utama yang dirujuk dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan untuk keperluan verifikasi dan identifikasi permasalahan yang terkait dengan kondisi eksisting penerapan pengendalian intern. Peneliti menggunakan metode yang dikenal sebagai observasi partisipan aktif, yang melibatkan pengambilan bagian dalam wawancara yang sedang diteliti. Analisis pokok bahasan dilakukan untuk memperoleh deskripsi yang nyata dan ringkas tentang implementasi SPIP di PTN X. Review dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan verifikasi bahwa materi baru tentang pengendalian intern telah sejalan dengan regulasi yang telah dibentuk dalam Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Selain itu, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada informan di bagian SPI, Kepegawaian, Keuangan, Penjaminan Mutu, serta Rumah Tangga dan Barang Milik Negara PTN X. Kemudian, peneliti melakukan penilaian secara obyektif dalam pelaksanaan SPIP terhadap PTN X.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (2014) sebagai berikut pembatasan data, penyajian data, pengambilan simpulan, dan konfirmasi. Para periset mengembangkan bagan temuan pemantauan dokumen sebagai bagian dari proses reduksi data, dengan menggunakan komponen dan aspek yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP No. 60 Tahun 2008. Peneliti mengembangkan matriks yang diberikan jawaban oleh informan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan dari wawancara. Tabel ringkasan yang mencakup temuan-temuan penelitian digunakan untuk menampilkan informasi yang didapatkan dari hasil interviu. Periset mendapatkan evaluasi terhadap perumusan topik penelitian setelah melakukan analisis terhadap data hasil wawancara dan mengecualikan materi yang dianggap tidak terlalu penting (Riszka Indriani, 2023).

Hal-hal berikut akan dianalisis dalam studi kasus ini. Sebagai langkah awal, melakukan penilaian terhadap lingkungan pengendalian. Pembicaraan selanjutnya berfokus pada subjek penilaian risiko sebagai topik pembahasannya kedua. Evaluasi aktivitas pengendalian merupakan penilaian proses tahap ketiga. Penilaian semua data informasi dan komunikasi menandai tahap keempat dari proses analisis. Penilaian atas pemantauan SPI adalah langkah selanjutnya yang harus diambil.

Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan aktivitas penyelenggaraan terbiasa, pengawasan, komparasi, penyesuaian, serta aktivitas lainnya yang berkaitan dengan aktualisasi tanggung jawab. Ini dicapai melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil audit dan review lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dapat melakukan evaluasi terpisah, yang dilakukan dengan penilaian sendiri, mengevaluasi kembali, dan penilaian efektivitas SPI. Evaluasi terpisah bisa dijalankan dengan memakai indeks uji pengendalian. Anjuran hasil audit dan pemeriksaan lainnya agar lekas dikerjakan serta diterapkan sesuai dengan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 menetapkan kriteria evaluasi penilaian SPIP dengan indikator yang dibagi menjadi tiga kategori utama: evaluasi penetapan tujuan, evaluasi struktural dan prosedural, serta evaluasi pencapaian tujuan. Dalam evaluasi penetapan tujuan, penilaian dilakukan atas efektivitas tujuan strategis dan kemampuan metode untuk mencapainya, di mana tujuan kementerian ditetapkan terlebih dahulu, diikuti dengan tujuan program yang kemudian dikonversi menjadi kegiatan atau program untuk setiap unit kerja. Tujuan program Satuan Kerja (Satker) PTN X harus selaras dengan tujuan program kementerian dan secara langsung berkontribusi dalam mencapai visi dan tujuan strategis

kementerian, serta memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan memiliki tujuan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diukur dengan baik.

Evaluasi struktural dan prosedural mengharuskan penelaahan mendalam terhadap organisasi dan fungsi setiap unsur dan faktor dari lima elemen SPIP. Lalu dikaitkan melalui perolehan dari empat sasaran utama SPIP. PTN X, secara umum lingkungan pengendalian telah terbangun dengan baik, meskipun beberapa sub unsurnya belum sepenuhnya dievaluasi secara mendalam.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Unsur Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Penerapan pada PTN X
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sudah ada Pakta Integritas yang disosialisasikan dan diterapkan; Namun belum ada Evaluasi
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Standar kompetensi menjadi acuan; Sudah ada evaluasi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Ada pertimbangan manajemen risiko dalam membuat kebijakan; Sudah ada evaluasi
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Struktur organisasi sudah sesuai; Sudah ada evaluasi, namun proses perbaikan belum berkelanjutan
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; Sudah ada evaluasi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Terdapat kebijakan dan ada upaya peningkatan kompetensi SDM; Sudah ada evaluasi dan perbaikan
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	APIP sudah berperan dengan baik
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Telah menjalin kerja sama dengan baik; Evaluasi telah dilakukan secara berkala

Sumber: Data Analisis yang telah diolah penulis Juni 2024

Lingkungan pengendalian merepresentasikan kondisi organisasi saat ini dan meningkatkan pemahaman atas pengendalian intern di seluruh operasi organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan menjadi penting karena dapat memberikan contoh kredibilitas dan moral. Pada umumnya, kontrol pengendalian di PTN X sudah berhasil dibangun. Namun, aspek-aspek yang melibatkan penegakan integritas dan etika memerlukan evaluasi dan tindakan yang berkelanjutan. PTN X telah membuat pedoman untuk memastikan bahwa standar integritas dan etika ditegakkan dalam pelaksanaan tanggung jawab, operasi manajemen keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Seluruh pegawai PTN X telah menyepakati dan mengesahkan Pakta Integritas yang memperkuat kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, terdapat kekurangan dalam hal penilaian yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah diterapkan.

PTN X telah menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk membantu semua anggota instansi dalam implementasi pekerjaan pokok dan tanggungjawabnya. SOP ini telah diikuti secara keseluruhan dan teratur. Namun demikian, tidak ada penilaian yang berkelanjutan terhadap SOP. Selain itu, tidak ada penilaian eksplisit terhadap sub unsur komitmen terhadap kompetensi. Ujian kompetensi pegawai dilakukan untuk menempati jabatan yang kosong atau diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat

untuk naik jabatan atau promosi, baik dalam jabatan fungsional maupun struktural. Selanjutnya, sub unsur struktur organisasi telah diselaraskan dengan persyaratan dan dinilai. Karena sifatnya ketergantungan satu sama lain, struktur organisasi dan sistem informasi sangat berkesinambungan (Apriliani, E., & Rachman, 2022). Namun demikian, proses penyempurnaan struktur organisasi belum berjalan dengan lancar, dengan adanya kekosongan posisi jabatan selama beberapa tahun.

Penilaian risiko merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi karena membantu mengidentifikasi dan meminimalkan potensi hambatan. Unsur penilaian risiko PTN X sudah dievaluasi secara berkala dan sudah berjalan dengan baik; meskipun demikian, beberapa elemen belum dimasukkan ke dalam daftar risiko. Pada Tabel 2 menunjukkan risiko telah teridentifikasi beserta analisisnya. Dalam sub unsur penilaian risiko telah berhasil dilaksanakan dan dievaluasi dengan cermat. Setiap program dalam organisasi telah diidentifikasi sebagai berisiko. Hal ini mencakup risiko internal dan eksternal.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Evaluasi Unsur Penilaian Risiko

No.	Sub Unsur	Penerapan pada PTN X
1	Identifikasi Risiko	Sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko; Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko
2	Analisis Risiko	Risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya; Sudah menentukan prioritas risiko, rencana tindak pengendalian, dan implementasi tindak pengendalian; Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko (level 3 dari skala 5); Pada peta risiko, belum ada risiko terkait kemungkinan terjadinya kecurangan; Telah ada evaluasi.

Sumber: Data Analisis yang telah diolah penulis Juni 2024

PTN X juga memberikan prioritas pada risiko dan merumuskan strategi manajemen untuk mengatasinya. Analisis risiko yang komprehensif telah dilakukan dan manajemen risiko telah dimasukkan ke dalam kegiatan operasional instansi pemerintah. Kebijakan yang diterapkan telah dipatuhi, dan evaluasi manajemen risiko telah dilakukan. Namun demikian, peta risiko tidak mempertimbangkan potensi terjadinya aktivitas kecurangan.

Penilaian secara berkala terhadap aktivitas pengendalian sangat penting agar memverifikasi mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan dan sudah dikerjakan dengan baik dan benar. PTN X telah secara konsisten melaksanakan dan menilai setiap sub unsur kegiatan pengendalian.

Data yang ditunjukkan pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa unsur kegiatan pengendalian di unit kerja ini telah dijalankan dengan baik. Namun demikian, penilaian menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal belum dilakukan. PTN X telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perolehan kinerja, yang dilaksanakan dengan cara bertahap dan diperiksa dengan cara periodik. Penilaian dilaksanakan setiap dua minggu sekali dengan menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONA). Hasil penilaian digunakan untuk membantu setiap unit kerja dalam mencapai tujuannya.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Evaluasi Unsur Kegiatan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Penerapan pada PTN X
1	Reviu atas Kinerja	Reviu telah dilaksanakan dan Hasil evaluasi ditindaklanjuti
2	Pembinaan SDM	Pembinaan SDM sudah dilakukan sesuai dengan kompetensi dan penugasan; Telah ada evaluasi
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	Kebijakan telah ada dan sudah dievaluasi
4	Pengendalian Fisik atas Aset	Kebijakan telah ada dan sudah dievaluasi
5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	Sudah dilakukan reviu secara periodik
6	Pemisahan Fungsi	Pemisahan fungsi sudah ada dan Evaluasi dilakukan secara berkala
7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Sudah ada otorisasi atas transaksi dan sudah ada evaluasi
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Pencatatan dilakukan secara akurat dan tepat waktu dan dilakukan rekonsiliasi secara periodik
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Pembatasan akses sudah ada namun belum optimal
10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Sudah dilakukan namun belum optimal
11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Sudah dijalankan dan telah dievaluasi

Sumber: Data Analisis yang telah diolah penulis Juni 2024

Pada subunsur akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya belum optimal karena adanya kekeliruan registrasi pada laporan keuangan serta sedikit transaksi yang tidak tercatat seperti jumlah persediaan yang berbeda antara pencatatan dengan fisiknya. Namun demikian, telah diperbaiki dengan melakukan perbaikan atau koreksi saat penyusunan laporan keuangan yang diaudit baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Pada sub unsur limitasi akses terhadap sumber daya dan pencatatannya, sudah ada limitasi akses tersebut namun belum optimal disebabkan oleh keterbatasan tempat penyimpanan persediaan atau gudang karena terkendala anggaran dalam penyediaan tempat gudang persediaan.

Dokumentasi telah dibuat tentang peristiwa penting dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. PTN X memiliki pengorganisasian, perlindungan, serta dokumentasi rutin atas semua SPI serta transaksi dan peristiwa penting. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan atas transaksi, peristiwa, serta data yang terkait.

Organisasi dapat menggapai sasaran yang dikehendaki dengan meyakinkan bahwa informasi dikomunikasikan dengan cara yang jelas dan efektif. Secara umum, sistem komunikasi dan informasi PTN X telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan Tabel 4, informasi yang relevan telah tersedia secara efektif melalui saluran media sosial. Setiap individu atau kelompok yang terkait, memiliki akses yang mudah terhadap data yang berkaitan dengan divisi tertentu. PTN X menggunakan survei kepuasan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja layanan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Para pemangku kepentingan dilibatkan, dan setiap departemen terkait telah menggunakan WhatsApp (WA) Center untuk melayani pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Evaluasi Unsur Informasi dan Komunikasi

No.	Sub Unsur	Penerapan pada PTN X
1	Informasi yang Relevan	Informasi yang tersedia mudah diakses; Strategi dan manajemen risiko telah dikomunikasikan; Rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan; Terdapat wadah pengaduan internal
2	Komunikasi yang Efektif	Sudah ada evaluasi terhadap komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal

Sumber: Data Analisis yang telah diolah penulis Juni 2024

Sebagian besar pegawai berinteraksi secara lisan dan juga melalui berbagai platform seperti Zoom, MsTeam, WhatsApp, dan platform media sosial lainnya. Mengelola sumber dana dan aset hanyalah salah satu contoh dari inti komunikasi tersebut. Tujuan dari setiap komunikasi adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aktivitas penipuan dan juga membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Sub unsur informasi dan komunikasi sudah dianalisis dan dievaluasi dalam rapat para pemimpin serta sudah ditindaklanjuti.

Tujuan dari penilaian unsur pemantauan ini yaitu agar mengevaluasi kualitas SPI serta untuk memverifikasi bahwa setiap temuan audit telah diselesaikan dan diperbaiki secara memadai. Tabel 5 menunjukkan bahwa unsur pemantauan pengendalian internal telah bekerja cukup efektif. Penilaian telah dilakukan, namun implementasi dari hasil penilaian tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pengawasan terhadap SPIP sudah dilaksanakan, akan tetapi pengelolaannya masih kurang optimal. Selain itu, telah dilakukan peninjauan, penilaian, dan penyesuaian secara berkala terhadap manajemen risiko. Namun demikian, hasil penilaian belum ditindaklanjuti secara memadai.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Evaluasi Unsur Pemantauan

No.	Sub Unsur	Penerapan pada PTN X
1	Pemantauan Berkelanjutan	Pemantauan telah dilakukan; Hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti
2	Evaluasi Terpisah	Evaluasi terpisah dan reviu manajemen risiko sudah dijalankan secara periodik

Sumber: Data Analisis yang telah diolah penulis Juni 2024

Kepala organisasi, ketua program dan kegiatan, dan pengelola operasional sudah teratur menilai efektivitas SPI yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Metode manajemen risiko telah dievaluasi dan hambatan atau risiko telah dilakukan pemantauan, namun belum dioptimalkan. Pegawai dengan keahlian tertentu melakukan evaluasi terpisah untuk menilai kinerja sistem pengendalian internal. Evaluasi ini dapat melibatkan inspektort atau auditor eksternal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian, menentukan penyebab kegagalan pengendalian, dan memahami bagaimana kegagalan tersebut berdampak pada tujuan instansi.

SIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menilai implementasi SPIP di PTN X serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP di PTN X secara umum berjalan dengan bagus serta sudah melaksanakan semua indikator implementasi

SPIP yang ditetapkan dalam PP No. 60 Tahun 2008. Akan tetapi, masih ada sebagian sub unsur yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar implementasi dapat lebih optimal.

Dalam sub unsur integritas dan etika, meskipun ada evaluasi dan tindak lanjut, evaluasi pada Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peninjauan SOP yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dan efektivitas dalam penerapan integritas dan etika kerja di PTN X. Selain itu, komitmen terhadap kompetensi juga menjadi perhatian penting. Uji Kompetensi pegawai yang dilakukan hanya pada saat ada jabatan yang kosong atau promosi pegawai baik fungsional maupun struktural menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan evaluasi kompetensi SDM yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan proses perbaikan yang terus-menerus agar seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dan memenuhi persyaratan kompetensi secara konsisten.

Masalah lain yang ditemukan adalah terkait catatan akuntansi dan beberapa transaksi yang tidak tercatat dengan baik. Misalnya, jumlah persediaan yang tidak sesuai dan terdapat perbedaan antara fisik dengan pencatatan akuntansi di subunit Barang Milik Negara (BMN) pada Aset. Selain itu, keterbatasan lokasi untuk penyimpanan barang atau gudang menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan sumber daya yang belum optimal di subunit BMN.

Pemantauan manajemen risiko yang dilakukan setiap tahun menunjukkan adanya upaya untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, namun hasil evaluasi dan revisi manajemen risiko belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap unsur SPIP agar implementasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaannya.

KETERBATASAN DAN SARAN

Analisis ini didukung oleh dokumen internal, dan informan penelitian dibatasi pada individu pegawai di dalam organisasi. Dalam penelitian di masa depan, disarankan lebih banyak informan dari unit utama dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus diikutsertakan, sehingga pandangan yang lebih komprehensif dapat diperoleh.

Sangat penting untuk menekankan peran pemimpin dalam membina lingkungan kerja yang beretika dan jujur agar PTN X dapat berhasil menerapkan SPI pada unsur lingkungan pengendalian. Meskipun secara umum komponen lingkungan pengendalian sudah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Secara khusus, perlu ada evaluasi yang lebih teratur terhadap komitmen kompetensi pegawai dan evaluasi yang lebih berkesinambungan terhadap SOP. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada jabatan yang kosong di PTN X yang sudah lama tidak ada yang menempati jabatan tersebut.

Pelaksanaan unsur-unsur kegiatan pengendalian internal di PTN X memerlukan proses dokumentasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan direkonsiliasi secara berkala untuk memastikan tidak adanya perbedaan antara fisik dan informasi yang tercatat, meskipun akses terhadap sumber daya dan catatan telah dibatasi.

PTN X harus melakukan penilaian secara menyeluruh dan mendalam atas program kegiatan dan pengendalian internalnya secara teratur serta mendokumentasikan atas evaluasi tersebut. Selanjutnya membuat satuan tugas dalam mengatasi kelanjutan hasil penilaian dan anjuran dari auditor eksternal, sehingga tindak lanjut tersebut bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdulah, V., Tinangon, J., & Maradesa, D. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 11(4), 132–143.
- Adella Fitri, S. et al. (2022). Satuan pengawasan internal : Harapan dan realita. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3567–3571. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- Afriliani, Maulana Sandria, A., Kartika Ardina, A., & Putri, S. (2022). Penerapan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Persepsi Mahasiswa Universitas Trilogi. *National Conference on Accounting & Fraud Auditing*.
- Alamsyahbana, M. I., Zulfachri, B., Zulaika, N., S., & A. P., & Munaf, T. (2022). Analisis Penerapan SPI dan Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Secara Dini. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1343–1356.
- Apriliani, E., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Struktur Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 1(2), 132–146.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- COSO. (2013). *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control - Integrated Framework*. www.COSO.org
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*, Nomor 754/P/2020.
- Fadhila Amri, N., & Fajarina Laming, R. (2022). Sistem Pengendalian Intern (SPI) Menjadi Dalang Problematika Akuntansi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 677–684. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1810>.
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *Equity*, 23(2), 151–166.
- Mangkunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi* (3rd ed.). UI-Press. Sage Publications.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (2008).
- Rapina & Christyanto, L. (2011). Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(6), 117–142.
- Refkah, G. E., & Shaleh, K. (2023). Analisis Efektifitas Sistem Pengawasan Penerimaan Pemerintah Kota dari Sektor Pajak Hiburan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 1394–1403.

- Riszka Indriani, D. S. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3006–3017.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitiain Kuaintitaitif, Kuailitaitif, dain R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Syawalina, C. F., Elviza, & Susanti, E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Barang Milik Negara Pada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Dki Jakarta. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(2), 183–194.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Salemba Empat.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 331–340.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. (2004).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wangi, G. S., & Sarumpaet, T. L. (2024). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Daerah Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 460–473.